

## KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA

Nurul Hasmi Apriliana<sup>1\*</sup>, Fatmawati<sup>2</sup>, Nasrul Haq<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*This study aimed to determine the Coordination of the Village Government in the Empowerment of Farmers Groups in Bontomarannu Village, Gowa Regency. This study used qualitative with 9 informants. Data collection techniques with in-depth interviews, direct observation, documentation. The results of this study showed that the communication carried out by the village government with effective farmer groups without strengthening the ego of each group was able to produce good coordination to support the forms of the empowerment process of farmers, village government and all farmer groups were very aware with the importance of coordination, all efforts in empowering farmers or farmer groups were more maximal, and coordination was very important between the village government and farmer groups that could produce forms of coordination such as maximum work results and also know all the needs of farmer groups in the field.*

**Keywords:** *coordination, empowerment of farmer groups*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Kelompok Tani Desa Bontomarannu Kabupaten Gowa. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan informan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komunikasi yang di lakukan oleh pemerintah desa dengan kelompok-kelompok tani yang efektif tanpa mengedapankan ego masing-masing kelompok mampu menghasilkan koordinasi yang baik guna menunjang bentuk-bentuk proses pemberdayaan para petani, pemerintah desa dan segenap kelompok tani sangat sadar betapa pentingnya koordinasi, semua upaya dalam pemberdayaan para petani atau kelompok tani akan lebih maksimal lagi, dan koordinasi sangatlah penting antara pemerintah desa dengan kelompok tani yang dapat menghasilkan bentuk koordinasi seperti hasil kerja yang maksimal dan juga mengetahui segala kebutuhan kelompok tani di lapangan.

**Kata Kunci:** koordinasi, pemberdayaan kelompok tani

---

\* nurul@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kelompok tani adalah kumpulan para petani yang terikat secara non formal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya), dalam keakraban, kepentingan bersama dan saling mempercayai, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama. Pembentukan kelompok tani merupakan suatu usaha pembangunan pertanian yang berfungsi untuk memperlancar hasil pertanian dan memberikan wadah yang kokoh di pedesaan dan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara para petani dalam kelompok untuk menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Pertanian merupakan salah satu sektor utama bagi mata pencaharian penduduk di Kabupaten Gowa.

Sehubungan dengan itu maka masyarakat di adalah kelompok tani yang berkembang. Adanya kelompok tani mempunyai tujuan bekerja sama dalam mengelolah lahan pertanian dengan baik untuk meningkatkan hasil produksi pertanian yang maksimal sehingga para anggota petani bisa merasakan dampak yang positif bagi

kehidupannya yang berujung pada kesejahteraan anggota petani.

Kelompok tani sebagai lembaga media kerjasama merupakan wadah dan sarana dalam membangun relasi untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan usaha tani yang dijalankan anggotanya. Selain itu, untuk menjalankan perannya sebagai wahana kerjasama bagi anggota kelompok, pengurus kelompok harus mampu memperkuat, memperlancar dan sekaligus mendorong terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan, baik antar anggota maupun dengan pihak lain.

Kedisiplinan setiap anggota dan pengurus kelompok dalam mentaati kesepakatan yang telah dibuat secara bersama seperti melakukan pertemuan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat bersama, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam memnuhi kebutuhan usaha taninya.

Koordinasi antar organisasi/ lembaga pada saat ini sangat berperan penting dalam sebuah organisasi untuk dapat tercapainya produktifitas, efisiensi, dan efektifitas, dari setiap kegiatan perlu diadakan antar organisasi terkait bahkan perlu sebuah tim pekerja (*Team Work*) yang lebih strategik untuk melaksanakan kegiatan. Konsep koordinasi diartikan sebagai suatu bentuk menyatukan kegiatan dan unit

kerja suatu instansi atau organisasi, hingga organisasi dapat bekerja sama dan bergerak menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan untuk melaksanakan tugas guna untuk mencapai tujuan organisasi.

Koordinasi adalah peran penting dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan koordinasi yang efektif. Untuk mencapai tujuan koordinasi yang efektif meliputi komunikasi dan tujuan yang jelas (Suminar 2015). Karena itu dalam penelitian ini koordinasi atau kerjasama antara Pemerintah Desa dan kelompok tani Desa Bontomarannu diciptakan untuk membangun kerja sama antara pemerintah dan kelompok tani dalam membangun pertanian di Desa Bontomarannu. Koordinasi diartikan sebagai bentuk penyesuaian atau penyelarasan kegiatan yang saling berhubungan dan penyusunan individu dan kelompok antar organisasi yang dilakukan secara teratur guna untuk mencapai tujuan organisasi.

Adanya peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/ KPTS/ OT. 160/ 4/ 2007 pada tanggal 13 April 2007 Tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani merupakan salah satu bagian dari peranan Pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya dalam hal ini petani, petani diatur dan ditata dalam wadah kelompok tani di

tiap Desa ditingkat Kecamatan sehingga memudahkan proses penyuluhan pertanian. Kabupaten Gowa merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang mayoritas masyarakatnya adalah petani dan tergabung dalam kelompok tani yang ada di Kecamatan. Di Kecamatan Bontomarannu sendiri terdapat 2 kelompok tani (data dari Dinas Pertanian) dan tersebar di tiga Desa yaitu Desa Romangloe dan Desa Nirannuang.

Berdasarkan penelitian terdahulu Suradisatra (2006). Pemberdayaan petani melalui kelembagaan kelompok tani merupakan salah satu metode pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk memungkinkan mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Lembaga kecil ini merupakan suatu bentuk organisasi kerja sama yang membuat masyarakat mampu mengembangkan respon yang sesuai dengan logika dan menjadi suatu wadah yang menyatukan para petani secara horizontal maupun vertikal.

Kelompok tani merupakan salah satu sarana atau alur kerjasama antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta hubungan dengan pemerintah serta sarana untuk mengembangkan para petani di Indonesia. Pendekatan kelompok tani salah satunya melalui suatu aktivitas

yang biasa dilakukan yaitu penyuluhan pertanian. Fungsi dari penyuluhan pertanian sendiri adalah pengambilan keputusan atau kesepakatan bersama dalam kelompok juga berkaitan dengan pendapat atau opini seseorang terhadap kelompoknya.

Upaya dalam menggiatkan kelompok tani memang bukan hal yang mudah. Banyak hal yang menjadi tantangan terutama pada jaman sekarang ini. Otonomi daerah menjadi salah satu hal yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada eksistensi kelompok tani. Ada kecenderungan pemerintah daerah kurang memberikan perhatian terhadap kelembagaan pertanian khususnya kelompok tani. Padahal kelembagaan kelompok tani merupakan aset yang mampu dibidang sangat berharga dalam rangka menuju pembangunan pertanian yang maju dan modern mengingat bahwa di sebagian besar daerah, pertanian menjadi basis sektor pembangunan.

Adapun masalah yang ada di desa Romangloe dan Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yaitu tidak adanya bantuan serta kurangnya koordinasi baik itu dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah yang bisa membantu kelompok tani dalam mengelola lahan persawahan

maupun lahan perkebunan. Persoalan diatas mengakibatkan kesejahteraan petani hanya menjadi impian saja ketika tidak dibenahi.

Kelompok tani di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ini masih memiliki berbagai persoalan diantaranya dengan rendahnya tingkat pendidikan dari anggota kelompok tani maka terkadang kurang mampu menerima inovasi baik berupa cara tanam dari pelatihan maupun penyuluhan.

Handoko (2005), menyebutkan bahwa koordinasi adalah kegiatan pada satuan yang terpisah (bidang-bidang atau departemen- departemen fungsional) dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Handyaningrat (dalam Tamim, 2002) menyebutkan bahwa koordinasi merupakan usaha menyatukan kegiatan dari satuan kerja/unit organisasi sehingga organisasi bergerak menjadi satu kesatuan yang bulat untuk melaksanakan seluruh tugas organisasi dalam mencapai tujuan.

Koordinasi menyangkut semua kelompok, orang, unit organisasi, sumber daya organisasi dan yang bekerja sama dalam setiap organisasi. Jasin (2011) menyebutkan bahwa fungsi koordinasi mengsinkronisasikan dan menyelaraskan kegiatan unit

departemen organisasi untuk mencapai hasil akhir yang sama. Tanpa koordinasi, terjadi pemborosan waktu, daya upaya dan uang sangat banyak untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi.

Koordinasi di perlukan dalam pekerjaan tim untuk menggerakkan dan mengimbangi tim dengan memberikan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing anggota dan menjaga agar kegiatan dilaksanakan dengan keselarasan. Menurut MC Farland yang dikutip oleh Handayani (2004) bahwa koordinasi merupakan proses dimana pemimpin menjamin kesatuan tindakan bawahannya dalam mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur dalam pencapaian tujuan bersama.

Menurut MC Farland yang dikutip oleh Handayani (2004) bahwa koordinasi merupakan proses dimana pemimpin menjamin kesatuan tindakan bawahannya dalam mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur dalam pencapaian tujuan bersama. Dari beberapa pandangan tersebut jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup organisasi pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan kepada warga masyarakat diperlukan adanya keterpaduan kerja yang membutuhkan koordinasi

termasuk dalam hal ini adalah Pembinaan Kelompok Tani di Desa Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Dalam sebuah organisasi Pimpinan perlu melakukan proses koordinasi kepada anggota organisasi dalam menyelesaikan tugas. Ndraha (2011:290), berpendapat bahwa jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi yaitu kewenangan untuk menyalurkan, menyeimbangkan dan menggerakkan kegiatan yang spesifik atau berbeda agar semuanya mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan untuk mengefektifkan pembagian kerja dan mengurangi dampak negatif spesialisasi.

Menurut Terry dalam buku Hasibuan (2006 : 85), koordinasi adalah usaha yang sinkron dalam menyediakan jumlah waktu yang tepat, dan mengarahkan keteraturan pelaksanaan dalam menghasilkan kesatuan tindakan dan harmonis pada sasaran yang telah ditetapkan. koordinasi memiliki syarat-syarat yakni : a). Kesatuan tindakan dan saling bekerja sama. b). Harus menghargai satu sama lain.

Dengan ini koordinasi sebagai usaha penyesuaian kerja antar anggota organisasi hingga tidak terjadi kesimpang siuran dan tumpang tindih,

hal ini berarti pekerjaan dapat terselesaikan seefisien mungkin. Jadi koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan pembagian kerja agar mempunyai keselarasan dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam sebuah organisasi.

Oleh karena itu, konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi. Koordinasi memerlukan kesadaran tiap anggota organisasi agar saling menyesuaikan diri dan tugas yang telah diberikan kepada anggota organisasi yang lain agar anggota organisasi yang lainnya tidak berjalan secara individu atau bergerak sendiri-sendiri.

Chenenema (dalam Kamil, 2003) menyatakan bahwa ada lima faktor yang menjadi penyebab mengapa koordinasi dibutuhkan dalam pembangunan daerah. Pertama :untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya yang terbatas dan untuk mengurangi terjadinya konflik tujuan diantaranya berbagai unit pemerintah yang tumbuh dengan cepat.

Handayani (1989:130) untuk mengatasi masalah-masalah dalam koordinasi yang ditimbulkan oleh hal-hal seperti tersebut di atas, berbagai usaha yang perlu dilakukan secara garis besarnya dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk seperti : a).

Mengadakan penegasan dan penjelasan mengenai tugas/ fungsi, wewenang tanggung jawab dari masing-masing pejabat/satuan organisasi yang bersangkutan. b). Menyelesaikan masalah-masalah mengakibatkan koordinasi yang kurang baik, seperti sistem dan prosedur kerja yang berbelit-belit, kurangnya kemampuan pimpinan dalam melaksanakan koordinasi. c). Mengadakan pertemuan-pertemuan staf sebagai forum untuk tukarmenukar informasi, pendapat, pandangan dan untuk menyatukan persepsi bahasa dan tindakan dalam menghadapi masalah-masalah bersama.

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Nirannuang dan Desa Romangloe

Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, dasar penelitian ini dilakukan agar kita mengetahui bagaimana koordinasi Pemerintah Desa dan kelompok tani Desa di Kecamatan Bontomarannu di Kabupaten Gowa.

Tipe penelitian adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan diteliti koordinasi Pemerintah Desa dan kelompok tani di Desa Bontomarannu di Kabupaten Gowa.

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Adapun Informan penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi yang selengkap-lengkapny mengenai pelaksanaan pelayanan. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah pegawai, baik pimpinan maupun bawahan yang terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi pemerintah desa dan kelompok tani di Desa Bontomarannu di Kabupaten Gowa. Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan

dua teknik pengumpulan data yakni Teknik observasi, dokumentasi,

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dikemukakan oleh Miles dan A. Michael Hurman dalam Sugiyono (2012 : 92) memiliki tiga langkah sebagai berikut : Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

Uji keabsahan data meliputi uji *kredibilitas* data, uji *transferability*, uji *depenability*, dan uji *confirmability* . Keabsahan data pada penelitian ini di periksa menggunakan uji kredibilitas data yang di lakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang dapat dilihat pada uraian sebagai berikut: 1). Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Tanaman Pangan dan

Hortikultura berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Kepala 2). Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a). Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b). Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- d). Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Jumlah aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Gowa berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Desember Tahun 2016 berjumlah 138 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1, dengan jenjang eselon dan jenis kelainan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan fungsi pelayanan di Bidang Pertanian.

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2, tingkat pendidikan karyawan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 98 orang (75,38 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa secara umum.

Jumlah karyawan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa yang menamatkan pendidikan S2 tercatat ada 23 orang, S1 tercatat sebanyak 98 orang dan paling banyak kedua yaitu S2 sebanyak 23 orang yang secara persentase, jumlah tersebut mencapai 17,69% dari seluruh karyawan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, hal ini tentu menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Gowa adalah



mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional. Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Daerah telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, tetapi belum menarik minat pegawai lainnya untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan. Visi sangat terkait dengan cita-cita atau keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang dideskripsikan secara ringkas dan jelas yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui implementasi Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka perumusan visi dan misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengacu dan memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih yaitu : Visi Kabupaten Gowa “Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Adapun struktur organisasi dinas pertanian Kabupaten Gowa Struktur terdiri dari Kepala Dinas sebagai *stakeholder* pemerintahan dibantu oleh sekretaris dan subag umum dan kepegawaian serta kemudian memiliki

empat bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di Kecamatan Bontomarannu sendiri terdapat 2 desa yang memiliki kelompok tani (data dari Dinas Pertanian) dan tersebar di dua Desa yaitu Desa Romangloe dan Desa Nirannuang. Adapun profil atau latar belakang dari ke-dua Desa tersebut yaitu:

Secara adminisitratif, Desa Romangloe merupakan bagian dari kecamatan Bontorannu kabupaten Gowa provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1628 Ha. Jarak desa dengan ibu kota kecamatan adalah 8 km dengan waktu tempuh 15 menit dengan kendaraan bermotor. Dari ibu kota kabupaten berjarak 17 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit.

Desa Romangloe secara geografis berada di ketinggian antara 5-50 m (diatas permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam pertahun antara 135 hari s/d 160 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 28 s/d 35<sup>^</sup>C. Secara administrasi Desa Romangloe terletak di wilayah kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa berpedoman kepada prinsip fungsionalisasi, diharapkan

permasalahan koordinasi dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya masalah-masalah, yang apabila tidak dipecahkan akan mengakibatkan berbagai hal yang tidak diinginkan seperti tidak efisien, tumpang tindih, kekaburan, pemborosan, dan sejenisnya. Maka sangat perlu upaya koordinasi yang stabil dalam menunjang pemberdayaan kelompok tani yang ada di kecamatan Bontomarannu.

1). Komunikasi 2). Kesadaran Pentingnya Koordinasi. 3.) Kompetensi Partisipan 4). Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi. 5). Kontinuitas Perencanaan.

Segala bentuk proses kerjasama dalam upaya pemberdayaan para kelompok tani yang ada di kecamatan Bontomarannu perlu adanya koordinasi yang baik sehingga tidak terjadi permasalahan yang tidak pernah kita harapkan, koordinasi sangat menunjang jalan proses kerjasama dalam hal upaya pemberdayaan para kelompok tani.

### **Komunikasi**

Komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana dalam hal menunjang koordinasi yang baik maka perlu adanya komunikasi yang baik sehingga

koordinasi berjalan lancar dan menunjang berbagai hal pendukung dalam pemberdayaan para kelompok tani.

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjadi selama ini tidak begitu berjalan sebagaimana mestinya, karena beberapa informasi mengenai bentuk bantuan-bantuan bagi para kelompok tani itu biasanya langsung dari kepala desa sendiri dan juga terkadang dari luar desa artinya kelompok tani sendiri yang mencari tau informasi tersebut.

Selanjutnya Sesuai dengan penjelasan informan diatas, bahwa setiap bentuk komunikasi sangat diperlukan untuk menunjang koordinasi dalam setiap informasi-informasi mengenai bentuk bantuan pertanian dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, setiap informasi yang ada akan selalu dikirim dari dinas terkait turun melalui kepala desa dan turun lagi ke para Kelompok Tani. Pemerintah Desa dan Kelompok tani harus selalu membangun komunikasi yang efektif agar segala bentuk pemberdayaan Pertanian di desa-desa mampu berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk

menunjang koordinasi yang baik maka komunikasi yang efektif dan komunikasi yang intens sangatlah diperlukan juga untuk menunjang berbagai aspek khususnya mengenai upaya melakukan pemberdayaan kelompok tani. Sejah ini upaya pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan kelompok tani yaitu terus menjalin komunikasi yang efektif dan mengedepankan kebutuhan bersama bukan kepentingan sendiri. komunikasi yang efektif tanpa mengedapankan ego masing-masing kelompok mampu menghasilkan koordinasi yang baik guna menunjang bentuk-bentuk proses pemberdayaan para petani, namun tidak dapat dipungkiri terkadang terjadi miss komunikasi antara pemerintah desa dan kelompok tani.

### **Kesadaran Pentingnya Koordinasi**

Kesadaran Pentingnya Koordinasi adalah pengetahuan dan ketaatan yang dilakukan antara pemerintah Desa dan Kelompok tani terkait kerjasama yang dilakukan di dua Desa yang ada di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Dengan adanya koordinasi yang jelas antara pemerintah desa dengan kelompok tani memberikan hasil yang ekefektif, tingkat pemberdayaan kelompok akan lebih besar jika masing-masing yang bersangkutan taat akan

koordinasi. Koordinasi yang taat akan menghasilkan nilai yang lebih.

Sesuai dengan penjelasan kedua informan di atas, dapat diketahui bahwasanya sejauh ini kesadaran dalam koordianasi yang kedua pihak rasakan sangatlah penting untuk menunjang setiap pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan kerjasama, koordinasi selama ini yang terbangun juga tak dapat dipungkiri sering terjadi mis komunikasi tapi itu hanya sebentar tidak berkelanjutan. Selama ini pemerintah desa juga sering kali mengingkakan kelompok tani agar terus melakukan koordinasi sehingga informasi-informasi yang masuk ke pemerintah desa itu selalu cepat diterima dan dijalankan.

Lanjut hasil Sesuai dengan penjelasan informan di atas, yang artinya pemerintah desa juga sangat mengharpakan dengan adanya koordinasi yang baik dari kelompok tani, selain dapat membantu dalam pembangunan pertanian juga dapat mengetahui segala kebutuhan kelompok tani dilapangan, sehingga pemebrdayaan kelompok tani dapat lebih maksimal lagi.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, penulis dapat menyimpulkan terkait kesadaran pentingnya koordinasi yaitu dengan

pentingnya kesadaran koordinasi maka semua upaya dalam pemberdayaan para petani atau kelompok tani akan lebih maksimal lagi, koordinasi sangatlah penting antara pemerintah desa dengan kelompok tani yang dapat menghasilkan bentuk koordinasi seperti hasil kerja yang maksimal dan juga mengetahui segala kebutuhan kelompok tani di lapangan.

### **Kompetensi Partisipan**

Kompetensi Partisipan adalah keterlibatan pejabat yang berwenang dan ahli di bidangnya yang dilakukan antara pemerintah Desa dan Kelompok tani terkait kerjasama yang dilakukan di dua Desa yang ada di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Kompetensi partisipan ini merasionalkan bagaimana hasil yang ada jika koordinasi berjalan secara efektif atau menjadi nilai dasar dari koordinasi itu sendiri. kompetensi partisipan ini menilai sejauh manakah keterlibatan pemerintah desa dalam upayanya memberdayakan kelompok tani, karena tanpa adanya koordinasi dengan kelompok tani maka akan sulit mengembangkan atau sulit melakukan pemberdayaan petani.

keterlibatan pemerintah dalam upaya pemberdayaan petani atau kelompok tani itu sudah mereka

lakukan, pemerintah dinas ataupun pemerintah desa yang ada, sudah melakukan koordinasi dalam pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana untuk kelompok tani di tiap desa, salah satunya pemberian bantuan traktor dan mesin penggiling padi, juga turun melakukan sosialisasi atau penyuluhan dengan kelompok-kelompok tani yang di desa-desa.

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kompetensi partisipan pemerintah desa dianggap cukup dalam keterlibatannya untuk terus memberdayakan para kelompok tani di desa-desa, akan tetapi yang seharusnya pemerintah desa harus lebih maksimal lagi bentuk partisipasinya atau keterlibatannya sehingga kelompok tani lebih progresif dalam melakukan program-program kerja pertanian di desa.

### **Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi**

Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi adalah bentuk kesepakatan, pelaksana, sanksi, dan sarana memotivasi berupa materi yang dilakukan antara pemerintah Desa dan Kelompok tani terkait kerjasama yang dilakukan di Desa Bontomarannu

Kabupaten Gowa. Kesepakatan dan komitmen selalu menjadi jalan koordinasi yang tepat untuk melakukan program-program pemberdayaan kelompok tani, jika tidak ada kesepakatan maka koordinasi tidak mampu berjalan, dari hasil kesepakatan tersebut barulah program kerja pemberdayaan kelompok tani bisa dijalankan secara efektif dan maksimal, dan juga perlu adanya insentif koordinasi yang jelas.

Hal ini sesuai hasil observasi sebelumnya yang dilakukan oleh penulis, bahwa selama ini antara pemerintah desa dengan kelompok tani terus berkoordinasi dengan membangun program kerja mengenai pertanian, beberapa program kerja yang ada seperti pengadaan pupuk, pengusulan perbaikan irigasi, rutin melakukan penyuluhan berkoordinasi dengan pemerintah, namun ternyata masih saja ada masyarakat yang kurang peduli dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan kelompok tani yang ada.

Sesuai dengan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa harapan warga sebagai petani sangat berharap lebih dari apa yang pemerintah desa dan kelompok tani sepakati untuk terus melaksanakan program-program pertanian, harapan yang lebih dimaksud

ada secepatnya membangun irigasi tambahan agar hasil pertanian warga desa bisa lebih maksimal lagi.

Dari pernyataan informan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi, kesepakatan yang terbangun selama ini hasil dari rapat-rapat yang diadakan pemerintah berkoordinasi dengan kelompok tani sangatlah menunjang dalam upaya pemberdayaan kelompok tani, mereka juga berkomitmen dalam membangun maupun memberdayakan kelompok tani dengan berbagai upaya dengan cara lebih mengedepankan kepentingan persoalan pertanian dan tetap mendengar masukan dan keluhan semua warga masyarakat petani yang ada di Desa-desa.

### **Kontinuitas Perencanaan Sangat Diperlukan**

Kontinuitas Perencanaan adalah umpan balik dan perubahan yang dilakukan antara pemerintah Desa dan Kelompok tani terkait kerjasama yang dilakukan di dua Desa yang ada di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Sebuah perencanaan tidak hanya pada jangka pendek, tetapi juga harus dengan perencanaan yang berjangka panjang atau berkelanjutan, koordinasi

pemerintah desa dalam perencanaan yang berkelanjutan akan memiliki hasil yang baik, perencanaan yang berkelanjutan dari hasil kesepakatan dalam upaya pemberdayaan kelompok tani,

Sesuai dengan penjelasan diatas, bahwasanya segala program atau hasil kesepakatan sebelumnya tetap ada yang namanya perencanaan lanjutan, karena jika tidak ada program lanjutan maka kesepakatan atau program yang telah ditentukan sebelumnya maka hasilnya tidak akan maksimal, ada banyak perencanaan lanjutan yang telah dibuat oleh pemerintah desa yang berkoordinasi dengan kelompok tani.

Berdasarkan pernyataan informan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa segala bentuk kontinuitas perencanaan sangat diperlukan, mengingat hasil jangka panjang yang diharapkan oleh semua pihak, jika program jangka pendek saja yang berjalan maka tidak akan menghasilkan nilai yang positif hanya sekedar saat itu saja, jadi sangat diperlukan perencanaan lanjutam untuk menunjang segala aspek program kerja pertanian yang ada di desa-desa.

Dan Faktor pendukung merupakan penunjang yang mendorong, mendukung, memperlancara segala bentuk persiapan atau pekerjaan yang

akan kita kerjakan, sedangkan faktor penghambat merupakan hal-hal yang menjadi penghambat, penyumbat dari persiapan atau pekerjaan yang akan kita kerjakan. Dari kedua faktor ini merupakan dinamika – dinamika dalam sebuah keputusan atau sebuah komitmen yang telah terbangun sebelumnya.

Faktor pendukung koordinasi pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan kelompok tani yaitu komunikasi yang komunikasi yang intens, karena dengan komunikasi yang lancer maka koordinasi yang kita lakukan itu akan sesuai harapan dan juga faktor pendukungnya seperti adanya Sosial media sebagai alat komunikasi yang efektif, faktor pendukung ialah yang mejadi pendorong tercapainya tujuan, dengan komunikasi yang intens dan manfaat sosial media dalam berkoordinasi dianggap efektif dan efisien dalam koordinasi.

Faktor penghambat merupakan kebalikan dari faktor pendukung, jika tadi ialah hal-hal yang mendorong dan mendukung kelancaran untuk menggapai sebuah tujuan, maka faktor penghambat ialah hal-hal yang menghambat dan menyulitkan kita dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini

koordinasi pemerintah desa yang dianggap menjadi penghambat dalam upaya memberdayakan kelompok tani.

Berdasarkan penjelasan informan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan yang mejadi faktor penghambat ialah bentuk komunikasi yang sedikit sulit dikarenakan jaringan internet atau jaringan telepon yang masih belum terjangkau hingga ke pelosok-pelosok, begitu pula dengan beberapa kelompok tani sebagian masih ada yang belum menggunakan handphone atau masih ada yang belum memiliki handphone, sehingga mengakibatkan keterlambatan informasi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya mengenai Koordinasi Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Kelompok Tani Desa di kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, maka dari itu penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1) Komunikasi yang di lakukan oleh pemerintah desa dengan kelompok-kelompok tani yang efektif tanpa mengedepankan ego masing-masing kelompok mampu menghasilkan koordinasi yang baik guna menunjang bentuk-bentuk proses pemberdayaan para petani, namun tidak dapat

dipungkiri terkadang terjadi miss komunikasi antara pemerintah desa dan kelompok tani. 2) Kesadaran pentingnya koordinasi yaitu dengan pentingnya kesadaran koordinasi maka pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan segenap kelompok tani sangat sadar betapa pentingnya koordinasi, semua upaya dalam pemberdayaan para petani atau kelompok tani akan lebih maksimal lagi, koordinasi sangatlah penting antara pemerintah desa dengan kelompok tani yang dapat menghasilkan bentuk koordinasi seperti hasil kerja yang maksimal dan juga mengetahui segala kebutuhan kelompok tani di lapangan. 3) Kompetensi partisipan pemerintah desa dianggap cukup dalam keterlibatannya untuk terus memberdayakan para kelompok tani di desa-desa, akan tetapi yang seharusnya pemerintah desa harus lebih maksimal lagi bentuk partisipasinya atau keterlibatannya sehingga kelompok tani lebih progresif dalam melakukan program-program kerja pertanian di desa. 4) Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi, kesepakatan yang terbangun selama ini hasil dari rapat-rapat yang di adakan pemerintah berkoordinasi dengan kelompok tani sangat lah menunjang dalam upaya pemberdayaan kelompok tani, mereka juga berkomitmen dalam membangun

dan menata maupun memberdayakan kelompok tani dengan berbagai upaya dengan cara lebih mengedepankan kepentingan persoalan pertanian dan tetap mendengar masukan dan keluhan semua warga masyarakat petani yang ada di Desa-desa. 5) Kontinuitas perencanaan sangat diperlukan, mengingat hasil jangka panjang yang diharapkan oleh semua pihak, jika program jangka pendek saja yang berjalan maka tidak akan menghasilkan nilai yang positif hanya sekedar saat itu saja, jadi sangat diperlukan perencanaan lanjutan untuk menunjang segala aspek program kerja pertanian yang ada di desa-desa. 6) Faktor pendukung koordinasi pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan kelompok tani yaitu komunikasi yang komunikasi yang intens, karena dengan komunikasi yang lancar maka koordinasi yang kita lakukan itu akan sesuai harapan dan juga faktor pendukungnya seperti adanya Sosial media sebagai alat komunikasi yang efektif. 7). Faktor penghambat ialah bentuk komunikasi yang sedikit sulit dikarenakan jaringan internet atau jaringan telepon yang masih belum terjangkau hingga ke pelosok-pelosok, begitu pula dengan beberapa kelompok tani sebagian masih ada yang belum menggunakan handphone atau masih ada yang belum

memiliki handphone, sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan informasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anomius, 2007 . Ragam Media Tanam.
- Ashari, Saptana dan Purwanti. 2004. *Dinamika Kemitraan Usaha Agribisnis Berdaya Saing dan Berkelanjutan*. Jakarta:Erlangga.
- Djiwandi, 1994 . Pengaruh Dinamika Kelompok Tani Terhadap Kecepatan Adopsi.
- Hariadi, Sinarru.2011. *Dinamika Kelompok Tani: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handayani. 1989. *Manajemen Konflik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Handayani, Soewarno. 2004. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- \_\_\_\_\_ 2002. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handayani, Soewarno. 2004. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Handoko, T Hani. 2005. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hermanto dan Swastika.2011. *Penguatan Kelompok Tani: langkah awal peningkatan hasil pertanian*. Surakarta. Universitas 11 Maret
- Hogue, Teresa. 2003. Building Collaboration, Stronger Families Learning Exchange. Bulletin No. 3 Winter.



- Kamil. 2003. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan. Bandung : PT RemajaRosdakarya.
- Sugiyono, 2012.*Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B.* Bandung Alfabeta.